

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Tahun 2014-2019 yaitu membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja, dengan strategi pengembangan kualitas tenaga kerja masyarakat yang mampu bersaing dipasar kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.
- b. Membaiknya struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal, dengan strategi menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama sinergis antar pelaku usaha.
- c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah, dengan strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan dukungan pelayanan perijinan yang baik.
- d. Semakin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat, dengan strategi penguatan potensi lokal dalam pengembangan pangan, dukungan sarana prasarana serta diversifikasi pangan.
- e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi peningkatan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
- f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan, dengan strategi meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani ikan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana perdagangan, dengan strategi pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, dan diarahkan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah, dengan strategi memperkuat industri kecil dan menengah yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, regional maupun internasional, untuk mendorong perekonomian daerah.
- i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah, dengan strategi pengembangan sektor pariwisata dalam mendorong kegiatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi wisata yang ada, keragaman budaya, dan peninggalan sejarah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian

nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 – 2016 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.19,602 triliun. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,84% menjadi Rp.21,923 triliun dan meningkat menjadi Rp.24,131 triliun pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,07 %. Pada tahun 2016 naik sebesar 8,67% menjadi Rp.26,223 trilion.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar Rp.17,020 triliun, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,936 triliun atau mengalami kenaikan 5,38 %. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,03 % menjadi Rp.18,838 triliun dan tahun 2016 naik sebesar 5,40% menjadi Rp.19,855 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2016

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2013	19.602.844,86	17.020.755,61
2	2014	21.923.411,31	17.936.288,38
3	2015	24.131.644,16	18.838.351,97
4	2016	26.223.219,71	19.855.844,24

Sumber : BPS, 2017

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2016, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar 23,38%, disusul sektor pertanian sebesar 21,91%, dan sektor perdagangan sebesar 12,57%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2016 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 41,25%, disusul sektor sekunder sebesar 31,59% dan sektor primer sebesar 27,13%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2016, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,84% menjadi 26,86% pada tahun 2016.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013–2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 30,6% meningkat sedikit menjadi 31,3% pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 21,26% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 naik lagi menjadi 32,2%.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang, meskipun merupakan penyumbang tertinggi kontribusi namun demikian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor tersier sebesar 41,58% menurun menjadi 41,31% pada tahun 2014, 41,03% pada tahun 2015 dan 40,92% pada tahun 2016.

Tabel. 3.2
Kontribusi sektor dalam PDRB

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)			
		2013	2014	2015	2016
1	Primer	27,84	27,85	27,84	27,13
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	23,63	23,40	22,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,22	4,44	4,35
2	Sekunder	30,6	31,03	31,22	31,59
C	Industri Pengolahan	21,24	21,62	21,80	22,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,21	9,27	9,29	9,23
3	Tersier	41,58	41,12	40,94	41,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,60	13,39	13,41
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,33	3,40	3,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	4,02	4,06	4,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,21	3,13	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,57	2,66	2,77
L	Real Estate	1,82	1,83	1,85	1,84
M, N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,85	3,67	3,66	3,65
P	Jasa Pendidikan	5,66	5,82	5,77	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,77	0,78	0,79
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,00	2,07	2,01	2,09

Sumber : BPS, 2017.

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2012 sebesar Rp.14,55 juta, meningkat menjadi Rp.19,37 juta pada tahun 2015 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.20,69 juta pada tahun 2016. PDRB perkapita berdasarkan harga konstan (ADHK) tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ke tahun. Tahun 2012 PDRB ADHK sebesar Rp.13,18 dan pada tahun 2015 menjadi Rp.15,10 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.15,66 pada tahun 2016. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
 Kabupaten Magelang Tahun 2012 – 2016

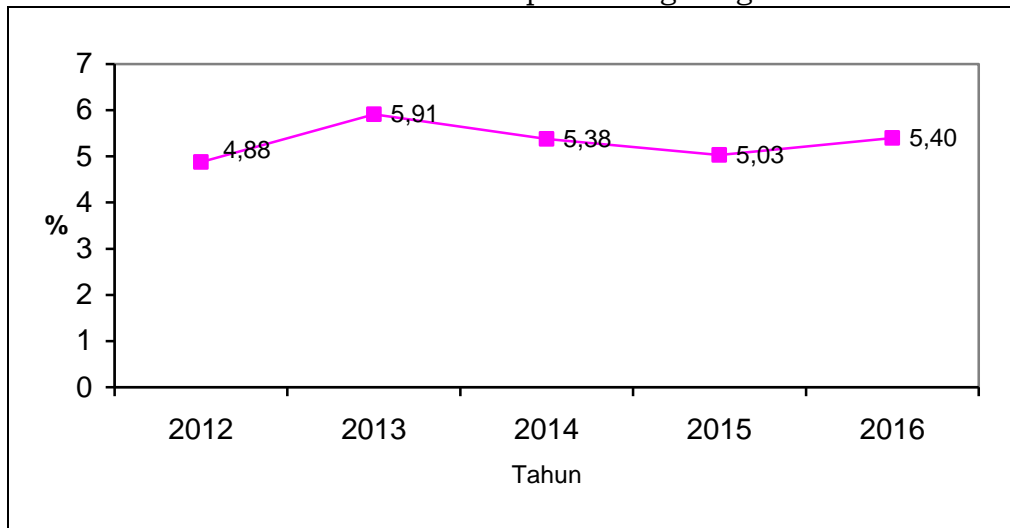
No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)
1	2012	14,55
2	2013	16,05
3	2014	17,69
4	2015	19,37
5	2016	20,86

Sumber : BPS, 2017.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2012 – 2016 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 4,88 % pada tahun 2012, 5,91 % pada tahun 2013, melambat menjadi 5,38 % pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 5,03% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 naik menjadi 5,40%.

Gambar 3.1.
 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2012-2016



Sumber : BPS, 2017.

Tabel 3.4
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2016

NO	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,46	1,89	1,75	3,26	3,33
2	Pertambangan dan Penggalian	7,39	5,90	4,52	1,71	2,94
3	Industri Pengolahan	8,57	10,93	7,44	5,13	5,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,14	7,65	3,32	1,50	7,46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	-0,29	1,81	1,33	2,17
6	Konstruksi	9,37	5,42	5,08	5,93	6,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,81	4,13	3,52	3,99	5,28
8	Transportasi dan Pergudangan	8,42	8,56	8,55	8,54	6,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,63	5,40	7,5	6,60	6,02
10	Informasi dan Komunikasi	10,56	7,95	13,04	9,45	8,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,1	4,39	5,23	8,44	10,07
12	Real Estate	4,01	7,7	7,18	7,35	6,56
13	Jasa Perusahaan	7,03	12,06	8,36	9,74	10,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,77	2,73	1,67	4,24	2,22
15	Jasa Pendidikan	17,82	9,41	10,17	7,10	6,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,46	7,10	11,78	6,92	9,78
17	Jasa lainnya	0,33	9,22	8,51	3,29	8,64
	PDRB	4,88	5,91	5,38	5,03	5,40

Sumber : BPS, 2017.

e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

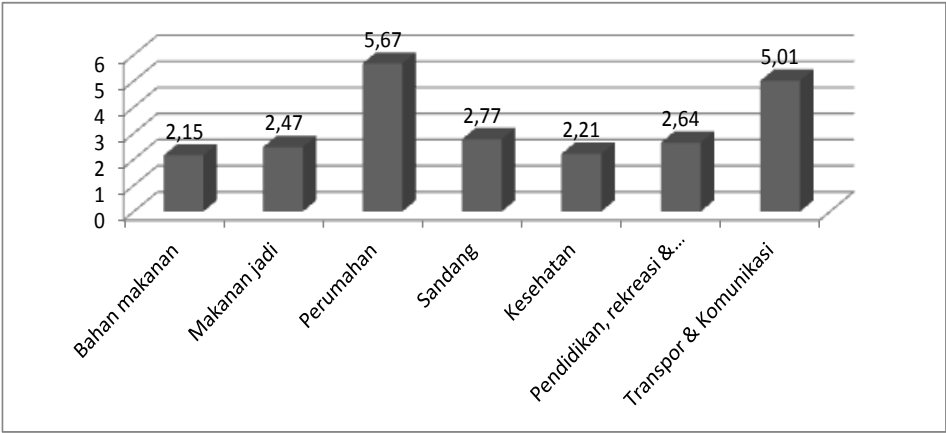
Selama Tahun 2017, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,47 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang laju inflasinya sebesar 2,86 persen. Namun demikian angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,71 persen dan lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen.

Selama periode Januari-Desember 2017 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 0,91 persen sedangkan inflasi terendah terjadi pada Agustus 2017 sebesar minus 0,47 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2017 bisa dilihat dalam gambar di bawah ini. Laju inflasi pada tahun 2017 tertinggi pada kelompok perumahan sebesar 5,67%, kelompok transportasi sebesar 5,01%, kelompok sandang sebesar 2,77%, kelompok pendidikan 2,64%, kelompok makanan jadi sebesar 2,47%, diikuti

kelompok kesehatan 2,21%, dan terakhir kelompok bahan makanan 2,15%.

Gambar 3.2
Laju Inflasi Tahun 2017 Menurut kelompok Pengeluaran



Sumber : BPS, 2017.

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 masih dapat dikendalikan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2019 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.5.
Target indikator makro ekonomi Tahun 2019

No.	Indikator Ekonomi	Target
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	6,4 – 7,1 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp.25,67 Juta
3	Inflasi	4 ± 1 %

Sumber : RPJMD Kab. Magelang 2014-2019

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat.

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan _actor, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti _actor pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, pemungutan pajak MBLB dengan teknologi informasi atau komputerisasi);
- d. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah;
- e. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti _actor, NJOP dsb;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- g. Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan _actor manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- h. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah.

Realisasi pendapatan tahun 2016-2017 dan target pendapatan daerah tahun 2018-2019 yang meliputi PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Syah, dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
 Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan 2017, Target Tahun 2018
 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.485.678.128	309.897.751.394	354.246.627.000	367.141.146.855
1	Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	119.704.741.000	127.519.378.529
2	Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	25.993.558.300	28.963.337.415
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	22.190.974.000	25.560.304.351
4	Lain-lain PAD Yang Sah	158.153.399.083	156.303.119.100	186.357.353.700	185.098.126.560
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	1.213.326.731.419	1.407.243.138.226	1.424.735.010.000	1.424.735.010.000
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	50.834.584.009	45.499.673.539	41.311.888.000	41.311.888.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.078.981.977.000	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	83.510.170.410	257.495.109.687	322.882.510.000	322.882.510.000
4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	44.220.622.000	-	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	534.497.679.881	460.531.639.322	576.861.456.000	473.546.373.000
1	Hibah	1.843.163.661	3.801.511.675	110.937.800.000	-
2	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya	126.190.719.220	151.472.357.647	135.955.789.000	143.578.506.000
3	Dana penyesuaian dan otsus	148.979.996.000	-	-	-
4	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.503.500.000	15.643.871.000	707.190.000	707.190.000
	Dana Desa	226.980.301.000	289.613.899.000	329.260.677.000	329.260.677.000
	J U M L A H	2.036.310.089.428	2.177.672.528.942	2.355.843.093.000	2.265.422.529.855

Sumber : BPPKAD

Realisasi PAD tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar :

Realisasi tahun 2016 : 288.485.678.128,-

Realisasi tahun 2017 : 309.908.084.804,-

Selisih lebih sebesar : 21.422.406.676,-

Kenaikan PAD tahun 2017 dibandingkan dengan PAD tahun 2016 tersebut berasal dari :

1. Pajak Daerah mengalami peningkatan dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah atau pendataan wajib pajak baru dan pemutakhiran subjek dan objek pajak serta dilaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk peningkatan kesadaran dalam melaporkan omzet dan pembayaran pajak.
2. Retribusi Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pengaruh yang signifikan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga disebabkan kunjungan wisata di tempat rekreasi dan olahraga semakin meningkat dan peningkatan dari retribusi pelayanan pasar yang dipengaruhi dari retribusi penempatan kios pertama di Pasar Secang.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan disebabkan meningkatnya bagi hasil laba BUMD terutama di Sektor Perbankan seperti Bapas, Bank Jateng dan BPR/BKK ini menunjukkan semakin membaiknya manajemen pengelolaan perbankan.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan disebabkan beberapa _actor, antara lain Penerimaan bunga deposito yang mengalami penurunan sangat signifikan ini menggambarkan bahwa perencanaan penganggaran belanja Tahun 2017 lebih baik dari Tahun 2016 dengan kata lain menurunnya SILPA Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun 2016.

Target yang ditentukan pada tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016 karena jumlah asset yang direncanakan dihapus dan dilelang pada tahun 2017 jumlahnya lebih sedikit.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dan menganut prinsip *money follow function*, mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2016 sebesar Rp.1.375.873.488.567,- atau 91,04 % dari Total Belanja Tidak Langsung, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 sebesar Rp.1.440.436.939.257,- atau mencapai 90,79% dari total Belanja Tidak Langsung. Pada Tahun 2019 pada komponen Belanja Tidak langsung direncanakan alokasi belanja Hibah sebesar Rp.56.405.500.000, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.16.633.414.000.

Penganggaran belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Kebijakan belanja pegawai diasumsikan sama dengan tahun 2017 yaitu tidak ada kenaikan gaji pegawai tetapi menganggarkan pemberian Tunjangan Hari Raya untuk pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang.

Rincian perkembangan alokasi belanja dari tahun 2016 s/d 2018 dan prediksi tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2017, Target Tahun 2018
dan Prediksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
2	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.500.412.430.074
1	Belanja Pegawai	956.765.652.145	862.787.039.594	907.146.346.000	938.836.944.480
2	Belanja Bunga	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	13.632.820.000	38.032.365.000	88.901.389.000	56.405.500.000
5	Belanja Bantuan Sosial	38.705.455.000	41.991.275.000	16.633.414.000	16.633.414.000
6	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa	364.995.692.191	13.864.123.170	13.829.113.000	17.647.591.594
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	479.610.746.506	455.888.980.000	455.888.980.000
8	Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000	4.151.389.987	5.000.000.000	15.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	697.923.996.996	917.112.364.905	1.175.175.774.000	
	Belanja pegawai	63.264.041.605	69.960.207.050	102.715.685.000	
	Belanja barang dan jasa	281.492.262.808	372.786.141.907	452.728.038.000	
	Belanja modal	353.167.692.583	474.366.015.948	619.732.051.000	
	Jumlah Belanja	2.073.797.409.332	2.357.549.304.162	2.662.575.016.000	1.500.412.430.074

Sumber : BPPKAD, 2018.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 s.d. 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8.
 Realisasi Pembiayaan 2016-2017, Target 2018 dan Prediksi 2019

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	547.380.168.182	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	492.803.710.268	457.569.190.778	187.705.855.000	88.506.773.540
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	54.276.457.914	63.994.404.086	131.251.068.000	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-		0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		20.398.400		0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	300.000.000	-	-	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-		0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan		-		0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	547.380.168.182	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	41.000.000.000	24.723.542.086	-	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	11.345.000.000	13.302.000.000	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
	Pembiayaan neto	495.035.168.182	483.558.451.178	306.731.923.000	78.302.773.540

Sumber : BPPKAD, 2018.

Secara keseluruhan, postur APBD Tahun 2016 – 2017, Target Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target 2018 dan Prediksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	288.485.678.128	309.897.751.394	354.246.627.000	367.141.146.855
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	119.704.741.000	127.519.378.529
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	25.993.558.300	28.963.337.415
1.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	22.190.974.000	25.560.304.351
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	158.153.399.083	156.303.119.100	186.357.353.700	185.098.126.560
1.2	Bagian Dana Perimbangan	1.213.326.731.419	1.407.243.138.226	1.424.735.010.000	1.424.735.010.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	50.834.584.009	45.499.673.539	41.311.888.000	41.311.888.000
1.2.2	D A U	1.078.981.977.000	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000
1.2.3	D A K	83.510.170.410	257.495.109.687	322.882.510.000	322.882.510.000
1.2.4	DID	-	44.220.622.000	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	534.497.679.881	460.531.639.322	576.861.456.000	473.546.373.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.843.163.661	3.801.511.675	110.937.800.000	-
1.3.2	Dana darurat			-	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	126.190.719.220	151.472.357.647	135.955.789.000	143.578.506.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	148.979.996.000	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	30.503.500.000	15.643.871.000	707.190.000	707.190.000
1.3.6	Dana Desa	226.980.301.000	289.613.899.000	329.260.677.000	329.260.677.000
A	JUMLAH PENDAPATAN	2.036.310.089.428	.177.672.528.942	2.355.843.093.000	2.265.422.529.855
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.500.412.430.074
2.1.1	Belanja Pegawai	956.765.652.145	862.787.039.594	907.146.346.000	938.836.944.480

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	13.632.820.000	38.032.365.000	88.901.389.000	56.405.500.000
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	38.705.455.000	41.991.275.000	16.633.414.000	16.633.414.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	364.995.692.191	13.864.123.170	13.829.113.000	17.647.591.594
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	-	479.610.746.506	455.888.980.000	455.888.980.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000	4.151.389.987	5.000.000.000	15.000.000.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.500.412.430.074
2.2	Belanja Langsung	697.923.996.996	921.112.364.905	1.175.175.774.000	843.312.873.321
2.2.1	Belanja pegawai	63.264.041.605	69.960.207.050	102.715.685.000	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	281.492.262.808	372.786.141.907	452.728.038.000	-
2.2.3	Belanja modal	353.167.692.583	478.366.015.948	619.732.051.000	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	697.923.996.996	921.112.364.905	1.175.175.774.000	843.312.873.321
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.073.797.409.332	2.361.549.304.162	2.662.575.016.000	2.343.725.303.395
	SURPLUS/(DEFISIT)	(37.487.319.904)	(183.876.775.220)	(306.731.923.000)	(78.302.773.540)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	547.401.510.682	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	492.803.710.268	457.569.190.778	187.705.855.000	88.506.773.540
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	54.276.457.914	63.994.404.086	131.251.068.000	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
			-		
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-		0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	321.342.500	20.398.400	-	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-		0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan		-		0
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	547.401.510.682	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	41.000.000.000	24.723.542.086	-	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	11.345.000.000	13.302.000.000	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000

Sumber : BPPKAD, 2018.